

IDENTIFIKASI TINGKAT KEKOTAAN NAGARI-NAGARI YANG ADA DI KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Lian Fortuna¹, Tomi Eriawan²

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta

Email: ¹Lianfortunna@gmail.com ²Tomierawan@bunghatta.ac.id

PENDAHULUAN

Perkotaan sebagai objek pada studi ini merupakan hal yang menarik bagi berbagai cabang ilmu pengetahuan sehingga banyak sekali ragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Perkotaan merupakan wilayah yang memiliki kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 120 Tahun 2020. Kriteria wilayah perkotaan adalah prasyarat tertentu dalam hal kepadatan penduduk, presentase rumah tangga pertanian dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan, yang dimiliki suatu desa/kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu desa/kelurahan. Fasilitas yang di wilayah perkotaan berupa TK, SMP, SMA, pasar, pertokoan, bioskop, rumah sakit, Hotel/Bilyar/.Diskotek/Panti Pijat/Salon. Kriteria desa perkotaan 2000 menggunakan 3 (tiga) indikator sebagai ukurannya yaitu: Kepadatan Penduduk per km², Persentase Rumah Tangga pertanian dan keberadaan atau akses untuk mencapai fasilitas perkotaan.

METODE

Penelitian ini yaitu Kualitatif dimana penelitian akan mendeskripsikan tentang kelas nilai yang di hasilkan nantinya, pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Di dalam mengumpulkan data, terdapat 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data observasi (pengamatan) dan data dokumentasi seperti : Sarana Pendidikan (TK,SMP, SMA) Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) dan Sarana Perdagangan dan jasa (Pasar, Pertokoan, Hotel/bilyar/Pub/diskotek/tempat Karaoke/Salon). Data Sekunder seperti: data Kecamatan IV Jurai dalam angka 2021, RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, Profil Nagari yang ada di

Kecamatan IV Jurai, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian per Nagari, Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon Kabel, Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, Standar Kriteria Kawasan Perkotaan, Tahap analisis yang dilakukan yaitu menggunakan metode pembobotan dengan membandingkan kriteria kawasan perkotaan dengan kondisi eksisting yang mengacu kepada Peraturan Badan Pusat Statistik no 120 tahun 2020.

Selanjutnya untuk metode perbandingan Analisis ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya perkembangan suatu Desa Pedesaan menuju Desa Perkotaan. dilihat dari tiga sektor sebagai ukurannya yaitu *ketersediaan fasilitas sarana* untuk mencapai fasilitas perkotaan antara Badan Pusat statistik dengan hasil analisis berdasarkan pertunjukan langsung di lapangan, *persentasi keluarga petani* yang di dapatkan dari sektor mata pencaharian penduduk antara badan pusat statistik dengan hasil analisis dan *kepadatan penduduk per Km²* dari luas kawasan yang di dapatkan oleh peneliti dengan luas kawasan dari badan pusat statistik. Analisis ini dilakukan membandingkan status Desa Pedesaan yang sudah di keluarkan atau di tetapkan oleh Perka BPS no 120 Tahun 2020 dengan Hasil analisis skoring. Berdasarkan factor/kriteria kota. Maka dengan analisis perbandingan tersebut dapat kita mengetahui penyebab terjadinya perkembangan suatu kelurahan/nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan yaitu mengetahui tentang hal yang akan di kaji dalam penelitian ini berdasarkan RTRW Kabupaten pesisir Selatan tahun 2010-2030 dengan Kebijakan Perka BPs no 120 Tahun 2020.

2. Analisis Skoring

Untuk hasil Analisis skoring di Nagari-nagari yang masih tergolong Pedesaan di Kecamatan IV Jurai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Kesimpulan Klasifikasi Nagari di Kecamatan IV Jurai 2021

Nagari	Aspek dan Kriteria Kota Berdasarkan BPS										Skor Kota	Keterangan
	Ciri Fisik					Ciri Penduduk						
	Pendidikan			Perdagangan dan jasa		Sarana Kesehatan	Kepadatan penduduk	Mata Pencaharian	RT Pengguna Telepon	RT Pengguna Listrik		
	TK/Sederajat	SMP/Sederajat	SMU/Sederajat	Pasar	Perkotaan							
Tambang	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	6	Desa Pedesaan
Koto Rawang	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	6	Desa Pedesaan
Sakdo Sari belau	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	5	Desa Pedesaan
Lampo	1	1	0	1	0	0	1	4	0	0	8	Desa Pedesaan
Lima Gedung	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	5	Desa Pedesaan
Batu Kank	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	6	Desa Pedesaan
Taratok Tengah	1	1	0	1	0	0	1	3	0	0	7	Desa Pedesaan
Ampuan	1	1	0	1	0	0	2	4	0	0	9	Desa Perkotaan
Ampung Terah	1	1	0	1	0	0	1	4	0	0	8	Desa Pedesaan
Bahi Sinyan	1	1	0	1	0	0	1	4	0	0	8	Desa Pedesaan
Sungai Goyo	1	1	1	1	0	0	1	4	0	0	9	Desa Perkotaan
Sungai Sarik	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	6	Desa Pedesaan
Bukit Kacik	1	1	1	0	0	0	1	4	0	0	8	Desa Pedesaan
Ganang Menghik	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	6	Desa Pedesaan

Sumber : Hasil Analisis 2021

3. Analisis Perbandingan

Dari keseluruhan Analisis yang dilakukan, Masing-masing Analisis memiliki kesimpulan tersendiri. Berdasarkan Perka BPs no 120 tahun 2020 sudah di tetapkan nagari yang tergolong Desa Pedesaan dan Nagari yang Terbilang desa Perkotaan. maka dapat dilihat pada tabel kesimpulan berikut ini.

Tabel 2
Hasil Kesimpulan Analisis Perbandingan

Hasil analisis kebijakan berdasarkan Perka BPs	Perbandingan Hasil Analisis dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Indikator kriteria Desa Perkotaan Perka BPs no 120 tahun 2020		
	Kepadatan penduduk per Km ²	Persentase Keluarga Petani	Keberadaan fasilitas Perkotaan
Desa Pedesaan	Untuk kepadatan penduduk per Km ² badan pusat statistik menggunakan data luas kawasan nagari yang sudah di hitung dan di keluarkan oleh BPS sendiri.	Untuk sektor pertanian badan pusat statistik mendapatkan persentasenya dari luas pertanian penduduk yang sudah ada di badan pusat statistik dalam angka BPS menggunakan data persentase rumah tangga pertanian dan luas lahan sawah pertanian.	Untuk fasilitas sarana BPS melalui data fasilitas keberadaan fasilitas sarana berdasarkan Kecamatan.
Hasil analisis nagari perkotaan	Kepadatan penduduk per Km ²	Persentase Keluarga Petani	Keberadaan fasilitas Perkotaan
Desa Perkotaan	Untuk kepadatan penduduk per Km ² berdasarkan hasil analisis menggunakan data kepadatan penduduk dari slip RTK ^W yang di hitung melalui arsip.	Untuk sektor pertanian dan hasil analisis menggunakan data persentase rumah tangga pertanian dan penduduk penduduk yang bekerja di berbagai sektor maka berdasarkan yang sudah di hitung berdasarkan RTK dan data kependudukan dan persentase agri.	Untuk fasilitas sarana Fasilitas sarana berdasarkan fasilitas sarana menggunakan keberadaan fasilitas sarana berdasarkan unit ter. sangat menggunakan data yang di tujukan ke lapangan.
Keterangan	Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat di simpulkan bahwa antara Badan Pusat Statistik dengan hasil Analisis dari perbandingan luas kawasan yang di dapatkan sudah berbeda. Maka dapat dikatakan dari hasil kepadatan penduduk yang di dapatkan oleh Badan Pusat Statistik dengan hasil analisis tidak sama.	Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel diatas dapat di simpulkan bahwa antara Badan Pusat Statistik dengan hasil Analisis dari cara proses penghitungan ditanya sudah berbeda. Maka dapat dikatakan dari hasil persentase yang di dapatkan oleh Badan Pusat Statistik dengan Hasil Analisis mungkin tidaklah sama.	Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel keberadaan fasilitas di atas dapat disimpulkan bahwa antara Badan Pusat Statistik dengan hasil Analisis dari pengumpulan datanya sudah berbeda. Maka dapat di katakan dari keberadaan fasilitas Perkotaan dan Badan Pusat Statistik dengan hasil Analisis tidaklah sama.

KESIMPULAN

kesimpulan dari penelitian ini terkait dengan Identifikasi Tingkat Kekotaan Nagari-Nagari yang ada Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan terdapat dua tingkatan yaitu: Nagari Ampuan dan sungai gayo dengan total nilai/skor kota 9. Artinya nagari tersebut sudah tergolong desa perkotaan. dan nagari lainnya masih termasuk Pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan dan kebijakan

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No . 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan .

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Bintarto, R, 1980. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hagget, Peter. 1970, *Geography, A Modern Synthesis. 3rd Edition*, London .

Ilhami, 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya

Koestoer (2001) *Dimensi Keruangan Kota : Teori dan Khusus* Jakarta

Prijono Tjiptoherijanto. 2000. "Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia". www.geocities.com

Jorge E Hardoy. " suatu permukiman dapat di sebut kota" <https://insanpelajar.com/14-definisi-kota-menurut-para-ahli/>

Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*: Penerbit Alumi.

Tipologi Desa Kota.[Internet]. <https://nicofergiyono.blogspot.com/2014/06/klasifikasi-dan-tipologi-desakota.html>

Konsultasiana Skripsi Tesis. 2014. Perencanaan Kota dan Daerah: Morfologi Kota. [Internet] <https://skripsikonsultasi.blogspot.com/2019/01/judul-tesis-perencanaan-kota-dan-daerah-19.html> (diakses Tanggal 06 2021 jam 14:15).